



IKP PEMILU PEMILIHAN SERENTAK 2024 PROVINSI LAMPUNG: DIMENSI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN KONTESTASI MENJADI FOKUS PENCEGAHAN

Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung– Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, untuk Pemilu serentak 2024 akan berlangsung pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 februari 2024, sedangkan Pilkada serentak 27 november 2024. Bagi Pengawas Pemilu, utamanya selain melaksanakan pengawasan langsung terhadap seluruh proses tahapan, yang juga menjadi urgensi dan harus dilakukan adalah upaya pencegahan. Sesuai amanat UU No 7 Tahun 2017 Pasal 94 ayat (1) butir a: “Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu, Bawaslu bertugas: Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu”.

Merujuk hal tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan identifikasi potensi kerawanan untuk Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. **Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)** memiliki empat dimensi, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dimensi partisipasi politik dan dimensi Penyelenggaraan Pemil. Berdasarkan hasil identifikasi sebelumnya dan publikasikan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 16 Desember 2024, dimensi penyelenggaraan pemilu menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi terjadinya kerawanan pemilu.

Secara umum Indeks kerawanan masuk kategori **sedang** untuk lingkup Provinsi, Lampung masuk pada posisi kedua dengan skor 64,61 setelah Provinsi Banten sebesar 66, 53. Sebagaimana yang tertera pada gambar berikut :

TINGKAT IKP PROVINSI (RAWAN SEDANG)

**RAWAN
SEDANG :**

**LAMPUNG
(64,61)**

NO	PROVINSI	SKOR IKP
1	BANTEN	66.53
2	LAMPUNG	64.61
3	RIAU	62.59
4	PAPUA	57.27
5	NUSA TENGGARA TIMUR	56.75
6	SUMATERA UTARA	55.43
7	MALUKU	53.69
8	PAPUA BARAT	53.48
9	KALIMANTAN SELATAN	53.35
10	SULAWESI TENGAH	52.90
11	BALI	52.75

NO	PROVINSI	SKOR IKP
12	GORONTALO	45.44
13	SULAWESI BARAT	43.44
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	43.02
15	KEPULAUAN RIAU	40.33
16	SUMATERA BARAT	39.68
17	SULAWESI TENGGARA	38.32
18	ACEH	38.06
19	SUMATERA SELATAN	35.07
20	JAWA TENGAH	34.83
21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29.89

Sedangkan kerawanan tinggi berdasarkan identifikasi indeks kerawanan secara nasional, Provinsi Lampung masuk kerawanan tinggi pada 2 (dua) dimensi yakni dimensi Penyelenggaraan Pemilu dan dimensi kontestasi. Dimensi penyelenggara pemilu provinsi Lampung diposisi urutan ke 9 (sembilan) dengan skor 81,13. Sedangkan posisi tertinggi pertama adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan skor 100. Kemudian pada dimensi kontestasi, Provinsi Lampung juga masuk kerawanan tinggi dengan skor 89,30 pada posisi ketiga dari 10 Provinsi urutan tertinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

10 PROVINSI RAWAN TINGGI PER DIMENSI IKP



KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

- Maluku Utara (100)
- Sulawesi Utara (89,58)
- Papua (80,53)
- DKI Jakarta (78,27)
- Yogyakarta (75,87)
- Jawa Barat (74,91)
- Kalimantan Timur (72,70)
- Sumatera Utara (72,61)
- Papua Barat (72,33)
- Kalimantan Selatan (66,96)



PENYELENGGARAAN PEMILU

- Kalimantan Timur (100)
- Sumatera Utara (94,29)
- DKI Jakarta (92,36)
- Jawa Tengah (91,67)
- Sulawesi Utara (91,60)
- Banten (89,43)
- Maluku Utara (86,48)
- Jawa barat (83,38)
- **Lampung (81,13)**
- Sulawesi Tenggara (80,48)



KONTESTASI

- Maluku Utara (100)
- DKI Jakarta (96,09)
- **Lampung (89,30)**
- Jawa Barat (83,71)
- Bangka Belitung (79,10)
- Sulawesi Utara (73,96)
- Bali (71,32)
- Nusa Tenggara Timur (68,96)
- Gorontalo (65,65)
- Riau (62,96)



PARTISIPASI

- Sulawesi Utara (100)
- DKI Jakarta (87,01)
- Yogyakarta (87,01)
- Kepulauan Riau (87,01)
- Sulawesi Tengah (87,01)
- Papua (64,72)
- Jawa barat (42,07)
- Kalimantan Timur (30,92)

Khususnya di Provinsi Lampung, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Dimensi Penyelenggaraan Pemilu masih masuk kategori tinggi di beberapa daerah, seperti Kota Bandar Lampung kerawana tinggi dengan skor (92,8), Kabupaten Tanggamus dengan skor (84,2) dan Pringsewu skornya (80,4). Sementara dimensi kontestasi masuk pada kategori tinggi yakni Kabupaten Lampung Tengah banyaknya skor (83,8) sedangkan Kota Bandar Lampung dengan skor (67,9). Untuk dimensi konteks Sosial Politik dari 15 kabupaten/kota se Lampung, hanya Lampung Barat yang masuk kategori kerawanan tinggi yakni dengan skor (95,6). Sebagaimana yang tertera pada gambar berikut:



IKP Pemilu dan Pemilihan menjadi penting dilakukan dengan memetakan kerawanan sebagai upaya mendasain Pencegahan pelanggaran Pemilu secara komprehensif. Hal ini tentu juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dengan memetakan kerawanan tingkat Kabupaten/kota, yang menjadi rujukan salah satu dasar informasi dan data diambil pada Pemilu sebelumnya. Berdasarkan hasil identifikasi kerawanan tingkat daerah kabupaten/kota, dapat diinformasikan bahwa IKP berdasarkan masing-masing dimensi Kabupaten/kota masuk kategori sedang. Untuk informasi secara perinci dapat dilihat pada gambar berikut:

KERAWANAN KAB/KOTA PER DIMENSI IKP

KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

KABUPATEN LAMPUNG BARAT	95.63	Tinggi
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	53.93	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	47.22	Sedang
KABUPATEN PRINGSEWU	46.8	Sedang
KABUPATEN PESAWARAN	41.85	Sedang
KABUPATEN PESISIR BARAT	39.76	Sedang
KOTA BANDAR LAMPUNG	38.53	Sedang
KABUPATEN MESUJI	35.88	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	30.02	Sedang
KABUPATEN WAY KANAN	29.24	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	28.62	Sedang
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	13.93	Sedang
KABUPATEN TANGGAMUS	11.01	Sedang
KOTA METRO	0	Rendah
KABUPATEN TULANG BAWANG	0	Rendah

PENYELENGGARAAN PEMILU

KOTA BANDAR LAMPUNG	92.89	Tinggi
KABUPATEN TANGGAMUS	84.29	Tinggi
KABUPATEN PRINGSEWU	80.49	Tinggi
KABUPATEN PESAWARAN	63.55	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	50.36	Sedang
KABUPATEN PESISIR BARAT	49.29	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	44.68	Sedang
KOTA METRO	36.79	Sedang
KABUPATEN TULANG BAWANG	36.77	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	27.13	Sedang
KABUPATEN WAY KANAN	18.18	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	6.56	Rendah
KABUPATEN MESUJI	0	Rendah
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	0	Rendah
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	0	Rendah

KONTESTASI

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	83.81	Tinggi
KOTA BANDAR LAMPUNG	67.98	Tinggi
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	53.58	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	32.92	Sedang
KABUPATEN MESUJI	18.74	Sedang
KABUPATEN PESISIR BARAT	13.75	Sedang
KABUPATEN TANGGAMUS	12.84	Sedang
KOTA METRO	9.77	Sedang
KABUPATEN WAY KANAN	0.1	Sedang
KABUPATEN PESAWARAN	0	Sedang
KABUPATEN PRINGSEWU	0	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	0	Sedang
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	0	Sedang
KABUPATEN TULANG BAWANG	0	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	0	Sedang

PARTISIPASI

KOTA BANDAR LAMPUNG	2	Sedang
KOTA METRO	0	Sedang
KABUPATEN PESAWARAN	0	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	0	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	0	Sedang
KABUPATEN PESISIR BARAT	0	Sedang
KABUPATEN MESUJI	0	Sedang
KABUPATEN TULANG BAWANG BARA	0	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG UTARA	0	Sedang
KABUPATEN WAY KANAN	0	Sedang
KABUPATEN TULANG BAWANG	0	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	0	Sedang
KABUPATEN PRINGSEWU	0	Sedang
KABUPATEN LAMPUNG BARAT	0	Sedang
KABUPATEN TANGGAMUS	0	Sedang

Untuk diketahui bahwa konteks sosial dan politik merupakan dari faktor Keamanan, Otoritas Penyelenggara Pemilu dan Otoritas Penyelenggara Negara. Dimensi penyelenggaraan Pemilu yakni Hak Memilih, Pelaksanaan Kampanye, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Ajudikasi dan Keberatan Pemilu, Pengawasan Pemilu isu Strategis. Kemudian dimensi kontestasi yakni Hak Dipilih dan Kampanye Calon. Sementara dimensi Partisipasi yaitu Partisipasi Pemilih, Partisipasi Kelompok Masyarakat.

Isu Strategis

Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 ini, secara nasional Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan umum 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

1. Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
2. Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalam mengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
3. Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan.
4. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital.
5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.

